Pengembangan Model Pembangunan Budaya Antikorupsi Berbasis Keluarga di Kelurahan Prenggan, Kota Yogyakarta

M. RABI'E, DAN SITI NURHIDAYATI

Universitas Negeri Yogyakarta

mrabiegapura@gmail.com

hida9033@gmail.com

p-ISSN: 2477-118X
e-ISSN: 2615-7977

ABSTRAK

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian dan pengembangan (*research and development*) yang bertujuan untuk mengembangkan dan menyempurnakan model yang sudah ada. Teknik pengambilan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program PBAK Berbasis Keluarga di Prenggan kurang maksimal. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator, yakni: *pertama,* partisipasi *stakeholders* sangat minim, khususnya partisipasi pemerintah lokal dan organisasi pemuda, partisipasi

secara aktif hanya dilakukan oleh relawan, dan partisipasi pasif dari keluarga sasaran. *Kedua,* keberlanjutan program terkendala pada pemahaman pemerintah lokal yang rendah, minimnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia, finansial yang masih belum mandiri, tidak ada kebijakan yang mendukung program dari pemerintah lokal, dan regenerasi relawan KPK di Prenggan yang tidak berjalan semestinya. Dengan demikian, alternatif pengembangan model yang peneliti tawarkan adalah model implementasi program partisipatif dan berkelanjutan. Kesimpulan ini didasarkan pada persoalan utama model yang sudah ada, yaitu program bersifat parsial karena tidak ada pendampingan secara berkelanjutan, dan juga rendahnya partisipasi *stakeholders.*

Kata Kunci: pengembangan model, implementasi program, partisipatif, berkelanjutan.

ABSTRACT

The approach of this research is research and development approach which aims to enlarge the given model. The data retrievement technique are observation, an in-depth interview, and document observation. The result of the research shows PBAK program which based on the family in Prenggan is already work but less maximum. The indicators of this research are: first, the minimum stakeholder's participation, especially the local government and the young organization, the only active participation comes from the volunteers and the passive participation comes from the target family. Second, the continuation of program constraints by the low understanding of local government, a little amount of human resources both in quantity and quality, not an independent financial aspect, there is no supporting policy from the local government, low regeneration of KPK volunteers in Prenggan. Therefore, the researcher offers a model enlargement alternative which is the implementation of the participative and sustainable program. This result is based on the given main model, which is the partial model because there is no

sustainable briefing, and also the low participation of the stakeholders.

Keywords: *The model enlargement, program implementation, participative, sustainable.*

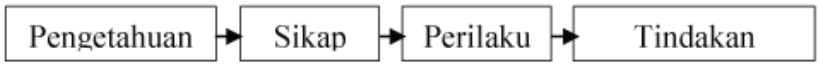
A. PENDAHULUAN

Keluarga memiliki peran sangat fundamental dalam pembentukan mental setiap generasi, karena pendidikan pertama yang akan diterima anak akan berlangsung di tengah lingkungan keluarga. Penguatan fungsi keluarga sangat penting dalam membangun karakter anak. Namun, hasil riset Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kota Yogyakarta dan Solo menunjukkan bahwa sangat minim keluarga yang menyadari fungsinya. Hanya sekitar 50 persen keluarga yang mengetahui fungsi sosialisasi dan fungsi afeksi, 37 persen mengetahui fungsi identitas sosial. Tetapi hanya 4 persen saja, ayah-ibu yang menganggap bahwa fungsi sosialisasi merupakan fungsi utama dalam keluarga (KPK, 2014: 58-59). Ini berarti bahwa mayoritas orangtua menginginkan anaknya menjadi anak yang berkarakter, akan tetapi orangtua tidak mengerti cara menerapkan dan menanamkan nilai-nilai tersebut kepada anak. Selain itu, masih dalam penelitian KPK, bahwa ayah-ibu belum ada kesepakatan nilai sehingga orientasinya cenderung menerapkan konsep sendiri-sendiri.

Pemahaman keluarga akan tugas dan fungsinya dapat memengaruhi sikap dan perilaku anggota keluarga. Dalam konteks pembangunan budaya antikorupsi, perilaku antikorupsi anggota keluarga secara bertahap akan memengaruhi tindakan sosial (lihat gambar 1). Transformasi budaya antikorupsi memang membutuhkan waktu yang lama, bisa satu atau dua generasi (Iswan Helmi, 2013). Transformasi budaya dalam konteks ini adalah menguatnya karakter sosial yang berpegang teguh pada nilai antikorupsi (KPK, 2014: 74). Nilai-nilai antikorupsi meliputi jujur, tanggung jawab, dan disiplin sebagai nilai inti, kemudian, nilai berani, adil, dan peduli sebagai nilai pada aspek sikap, selanjutnya nilai sederhana, kerja keras, dan

mandiri sebagai nilai pada aspek etos kerja (KPK, 2014: 27).

Gambar 1. Transformasi Budaya Antikorupsi



Sumber: KPK, 2014: 55

Dalam rangka penguatan fungsi keluarga, tahun 2014 KPK memulai *pilot project* Program Pembangunan Budaya Antikorupsi (PBAK) Berbasis Keluarga di Kelurahan Prenggan, Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta. Kelurahan Prenggan sebagai lokasi *pilot project* telah memiliki modal sosial untuk mengembangkan nilai-nilai antikorupsi. Misalnya nilai kejujuran, terdapat kearifan lokal *molimo* khususnya nilai *ojo maling* disertai hak dan kewajiban, serta nilai *nrimo ing pandhum* (sederhana). Selain itu, kondisi sosial yang kuat memegang prinsip nilai-nilai agama menjadi pertimbangan dipilihnya Prenggan sebagai lokasi intervensi.

Pelaksanaan program KPK ini menjumpai kendala. Berdasarkan riset terdahulu yang dilakukan peneliti, partisipasi aktif masyarakat dalam program ini terbatas hanya pada beberapa kader Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di setiap RT/RW yang berjumlah 30 orang. Tidak ada keterlibatan dari unsur pemerintah kelurahan secara nyata, karena yang ada hanya dukungan moral. Selain pemerintah, tokoh masyarakat, dan pemuda juga tidak terlibat aktif. Semua ini menandakan kelemahan pelaksanaan suatu program yang sangat membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat (M. Rabi'e, 2015). Di samping masalah partisipasi yang tidak menyeluruh, program ini terlihat parsial karena tidak ada pendampingan secara berkelanjutan setelah *pilot project* selesai.

Berdasarkan uraian urgensi permasalahan tersebut, penelitian ini berfokus menjawab pertanyaan bagaimana capaian implementasi program di Prenggan dan bagaimana alternatif pengembangan model Pembangunan Budaya Antikorupsi berbasis keluarga di Prenggan.

Orientasi pemilihan fokus penelitian ini karena dibutuhkan pilihan alternatif yang dapat dilakukan, khususnya oleh KPK sendiri dalam implementasi program. Untuk menganalisis alternatif pengembangan model implementasi program, maka langkah pertama adalah mengetahui capaian implementasi program pembangunan budaya antikorupsi berbasis keluarga di Kelurahan Prenggan.

1. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (a) bagaimana capaian implementasi program pembangunan budaya antikorupsi berbasis keluarga di Kelurahan Prenggan? dan (b) bagaimana pengembangan model pembangunan budaya antikorupsi berbasis keluarga di Prenggan?

2. Tujuan Kajian

Tujuan khusus penelitian ini adalah untuk mengetahui capaian implementasi program dan untuk menghasilkan alternatif pengembangan model pembangunan budaya antikorupsi berbasis keluarga di Kelurahan Prenggan.

3. Metode Penelitian

Metode *research and development* digunakan untuk mengembangkan dan menyempurnakan model yang sudah ada (Borg dan Gall, 1979: 624). Teknik pengambilan data dilakukan melalui observasi partisipan, wawancara mendalam, dan telaah dokumen (Sugiyono, 2008: 63). Lokasi penelitian adalah di RW 1-13 Kelurahan Prenggan dengan jabaran informan penelitian: (1) Tim Pendamping Program dari KPK; (2) Pusat Kajian Antikorupsi UGM dan *non-government organization* (NGO), yakni Perkumpulan IDEA Yogyakarta; (3) Pemerintah Kelurahan Prenggan; (4) Relawan KPK di Prenggan; (5) Organisasi kemasyarakatan yang meliputi Saya Perempuan Antikorupsi (SPAK) Prenggan, PKK, Karang Taruna, dan paguyuban RT/RW; dan (6) Keluarga sasaran program yang diwawancara secara random berdasarkan RT/RW. Adapun teknik

keabsahan dan kredibilitas data dalam penelitian ini menggunakan teknik pemeriksaan triangulasi sumber (Moleong, 2010: 330-331). Sedangkan teknik analisis data dilakukan melalui empat tahap, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2008: 246).

4. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini merupakan pengembangan hasil temuan penelitian yang sebelumnya dilakukan oleh peneliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat hanya terbatas pada relawan yang dibentuk KPK, sebab pihak-pihak yang lain tidak berpartisipasi aktif (M. Rabi'e, 2015). Untuk mengatasi permasalahan ini, KPK perlu menjembatani relawan dengan pihak-pihak yang belum terlibat dalam program ini. Persoalan ini terjadi karena kendala lemahnya kesadaran dan kurangnya pemahaman masyarakat (Cucu Sutrisno, 2017). Oleh karena itu dibutuhkan evaluasi pencapaian program sampai saat ini, pemetaan masalah dalam implementasi kegiatan, dan kemudian disusun alternatif pengembangan model pelaksanaan Program PBAK Berbasis Keluarga di Kelurahan Prenggan.

5. Kerangka Teori

5. 1. Partisipasi dan Kolaborasi *Stakeholders*

Pembangunan budaya antikorupsi akan berhasil apabila terdapat partisipasi aktif dari masyarakat (Bintoro Tjokroamidjojo, 1993: 53). Partisipasi dapat dimaknai sebagai keterlibatan seseorang secara sadar dalam intraksi sosial tertentu (Ach. Wazir Ws., *et al*, 1999: 29). Menurut I Nyoman Sumaryadi (2010: 46), bentuk peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan dapat berupa pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal, dan/atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan. Dalam kegiatan pembangunan, partisipasi menekankan pada keikutsertaan masyarakat secara suka rela yang didasari oleh

determinan dan kesadaran dari masyarakat itu sendiri dalam program pembangunan (Conyer dalam Soetomo, 2006: 439).

Dalam konsep pembangunan, partisipasi diyakini sebagai suatu pilihan yang harus ditempuh untuk menjamin keberlanjutan pembangunan di bidang apapun, termasuk pembangunan budaya antikorupsi di tengah-tengah masyarakat.

Selain partisipasi aktif, yang juga menentukan keberhasilan suatu program pembangunan adalah kolaborasi antaraktor (Ansell dan Gash dalam Yung Duck Jung *et al.,* 2009: 1). Aktor-aktor dalam pembangunan budaya antikorupsi di Prenggan meliputi pemerintah, masyarakat, dan swasta (KPK, 2016: 21). Dalam penelitian ini, pemerintah terdiri dari lurah dan mitra (RT/RW), masyarakat meliputi keluarga sasaran program serta organisasi lokal yang ada di Prenggan (PKK, Paguyuban PAUD, Karang Taruna, PM-NA, Aisyiyah, dan kelompok RT/RW), sedangkan swasta adalah kelompok di luar pemerintah dan masyarakat, di antaranya NGO, Pengusaha, dan lembaga pendidikan. Pilar-pilar *governance* ini harus ada kerja sama sehingga tujuan suatu program tercapai.

Budaya antikorupsi dapat terwujud dengan proses pendidikan dan kampanye yang berkelanjutan sepanjang hidup seseorang (*on going process*). Sebagai suatu pemberdayaan mental, maka bersifat jangka panjang dengan proses yang berkelanjutan.

5. 2. Keberlanjutan Program

Prinsip keberlanjutan dalam pembangunan berarti bahwa sistem-sistem tersebut harus dievaluasi dalam peranan dan fungsi jangka panjang (Ife, Jim, 2008: 178). Indikator untuk mengevaluasi keberlanjutan suatu program dapat dilihat dari pemahaman di antara para aktor, ketersediaan kompetensi dan kemandirian SDM, finansial, dampak dan *output* kegiatan, dan regenerasi relawan.

Pertama, pemahaman di antara para aktor. Menurut Geoge C. Edwards III (Subarsono, 2013: 90), apa yang menjadi tujuan kebijakan atau program harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran.

Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak diketahui oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi (penolakan) oleh kelompok sasaran.

Kedua, ketersediaan kompetensi dan kemandirian SDM dan finansial. Masih menurut Geoge C. Edwards III (Subarsono, 2013: 91), walaupun isi kebijakan atau program sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, maka program tidak akan bisa berjalan. Sumber daya tersebut berwujud sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan sumber daya finansial. Tanpa sumber daya, kebijakan atau program hanya menjadi dokumen di atas kertas.

Ketiga, dampak dan *output* kegiatan. Dunn dalam Wibawa (1994: 5) membedakan konsekuensi kebijakan atau program menjadi dua, yaitu *output* dan dampak. *Output* merupakan barang, jasa, atau fasilitas lain yang diterima oleh sasaran. Sedangkan dampak adalah kondisi fisik maupun sosial sebagai akibat dari *output* kebijakan. Subarsono (2013: 121-122) menyatakan bahwa dampak dan *output* merupakan bagian dari evaluasi kebijakan atau program. Agar suatu program atau kegiatan bisa berjalan dalam jangka waktu yang panjang dan berkelanjutan, maka evaluasi sangat diperlukan dengan melihat *output* dan dampak dari program yang telah berjalan.

Keempat, regenerasi relawan. Dilansir dari KBBI *online,* regenerasi dapat diartikan sebagai (1) penggantian alat yang rusak atau hilang dengan pembentukan jaringan sel baru dan (2) penggantian generasi tua kepada generasi muda atau peremajaan. Dalam kaitannya dengan komunitas masyarakat seperti relawan antikorupsi, maka fungsi regenerasi adalah menyediakan sumber daya manusia sebagai penggerak komunitas agar bisa konsisten dan berkelanjutan.

B. PEMBAHASAN

1. Model Program PBAK Berbasis Keluarga Versi KPK

Program pembangunan budaya antikorupsi di Prenggan mengusung konsep dengan basis utama adalah keluarga. Sebagai unit terkecil masyarakat, keluarga diharapkan menjadi inti gerakan sosial (*social movement*) pemberantasan korupsi di Indonesia. Sehingga pencegahan korupsi dilakukan dengan menanamkan nilai-nilai antikorupsi kepada anak usia dini dengan cara edukasi di tingkat keluarga (KPK, 2014: 74).

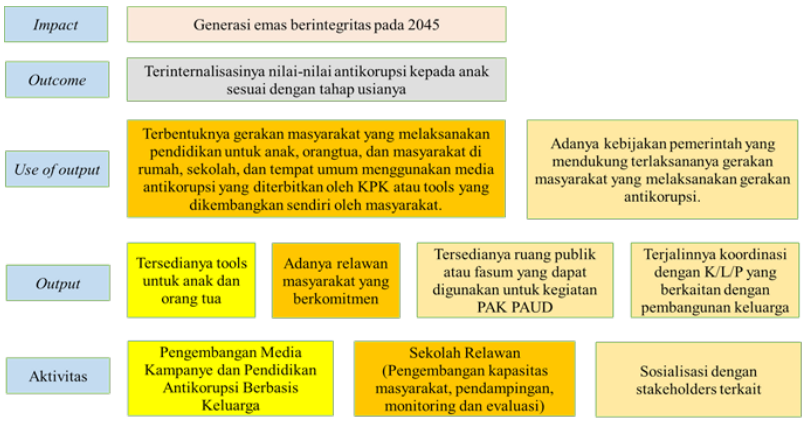
Tindakan sosial antikorupsi membutuhkan upaya penanaman nilai-nilai antikorupsi secara sistematis dan berkelanjutan. Pada dasarnya kepribadian seseorang tidak muncul secara instan, namun melalui sebuah proses (Frimayanti, 2017: 91). Oleh karena itu, KPK membentuk komunitas relawan antikorupsi di Prenggan. Relawan KPK adalah kelompok masyarakat yang direkrut, dilatih, dan dibekali pengetahuan untuk melakukan aksi antikorupsi di wilayah RT masing-masing (lihat gambar 2). KPK pertama kali di Prenggan melaksanakan Sekolah Relawan (SR) kepada masyarakat lokal yang telah direkrut oleh pemerintah kelurahan. SR bertujuan meningkatkan kompetensi relawan dalam melakukan aksi.

Pendekatan intervensi Program PBAK Berbasis Keluarga di Prenggan meliputi tiga (3) pendekatan, yaitu: edukasi pri-mer, edukasi sekunder, dan kampanye publik (KPK, 2014: 72). Berikut ini adalah model pendekatan intervensi program yang dilakukan oleh KPK di Prenggan (lihat gambar 3).

Untuk mencapai tujuan yang dimaksud, KPK telah membuat garis ideal dari aktivitas sampai *impact,* yaitu terbentuknya generasi emas berintegritas tahun 2045 (lihat gambar 4). Aktivitas yang pertama kali dilakukan KPK adalah melakukan sosialisasi dengan *stakeholders* terkait, sekolah relawan, dan pengembangan media kampanye antikorupsi.

Gambar 4 Tahapan Intervensi Program PBAK Berbasis Keluarga

Sumber: KPK, 2014



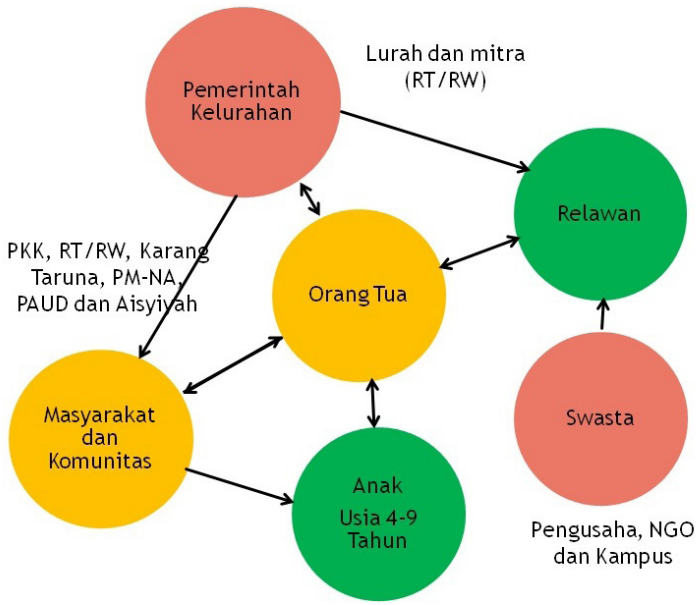
2. Partisipasi *Stakeholders* dalam Program PBAK Berbasis Keluarga di Prenggan

Proses penyusunan program ini telah melibatkan pakar, seperti akademisi dan praktisi, serta *stakeholders* terkait di Prenggan (KPK, 2014: 46). Tujuannya agar pelaksanaan program sesuai dengan kondisi sosial-budaya di lokasi intervensi, dan meminimalkan potensi kegagalan program.

Pilar-pilar *governance* yang seharusnya berpartisipasi aktif dapat diklasifikasikan, yaitu pemerintah (Lurah dan RT/RW), masyarakat (keluarga sasaran, PKK, paguyuban RT/RW, paguyuban PAUD, Aisyiyah, PM-NA, dan Karang Taruna), dan swasta (pengusaha, NGO, dan kampus). Namun yang terlibat aktif adalah relawan, Aisyiyah, dan kelompok anak sebagai sasaran program (lihat gambar 5).

Gambar 5 Partisipasi Stakeholders

Sumber: Peneliti, 2018



Relawan terlibat aktif karena relawan telah dilibatkan KPK sejak awal program. Secara moral, relawan memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar agar program terus berjalan, bahkan saat program dilaksanakan secara mandiri oleh masyarakat. Sedangkan Aisyiyah terlibat aktif dilatarbelaka-ngi oleh kesamaan visi dan misi, yaitu pendidikan keluarga.

Persoalan partisipasi relawan terletak pada kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM). Secara kuantitas, proporsi keberadaan relawan tidak sesuai dengan jumlah keluarga sasaran, sedangkan secara kualitas masih belum mumpuni dalam banyak hal. Tingkat partisipasi relawan masih rendah, apabila dilihat dari antusiasme dalam forum rapat, seperti mengajukan pendapat berbeda atau inisiatif memunculkan ide-ide yang lain. Selain kasus tersebut, relawan yang mampu mempraktikkan *public speaking* dengan baik sangat sedikit (minimal berani tampil). *Skill* komunikasi dalam forum sang-at diperlukan mengingat peran relawan sebagai agen untuk melakukan sosialisasi dan kampanye antikorupsi kepada masyarakat luas, setidaknya di tingkat RW dimana relawan seba-gai

perwakilan. Belum lagi, relawan seringkali diundang oleh lembaga pemerintah, kampus, dan NGO untuk ikut mengisi sosialisasi tentang pendidikan antikorupsi berbasis keluarga.

Kedua**,** partisipasi Pemerintah Kelurahan Prenggan dalam pelaksanaan program masih jauh dari ideal. Pemerintah memiliki kapasitas secara formal untuk menjadikan program se-bagai prioritas atau tidak. Harapannya, pemerintah menjadikan program bersama yang didukung secara formal dengan kebijakan anggaran dan tindakan lain untuk kemajuan program. Namun, dukungan pemerintah sangat rendah, ini terjadi karena tiga faktor, yaitu: (1) pergantian kepemimpinan; (2) salah satu tokoh masyarakat yang juga sebagai pegawai kelurahan memiliki konflik kepentingan sehingga mengarahkan program KPK tersebut jauh dari birokrasi kelurahan; (3) Relawan KPK di Prenggan tidak ada yang menjadi aktivis kelurahan, sehingga tidak ada akses terhadap kelurahan.

Ketiga*,* tingkat partisipasi pihak swasta dalam Program PBAK Berbasis Keluarga di Prenggan masih rendah. Ruang partisipasi swasta memang belum terbentuk secara maksimal, seperti lembaga NGO, kampus, dan peran pengusaha dalam membantu progam. Meskipun ada usaha relawan dengan menggandeng pengusaha untuk membantu dalam pendanaan kegiatan, akan tetapi belum sistematis dan belum membangun kerja sama secara berkelanjutan.

Dari uraian di atas, implementasi Program PBAK Berbasis Keluarga di Prenggan kurang partisipatif. Lebih-lebih tidak ada dukungan secara nyata dari pemerintah, mayoritas ormas, dan pemuda di Prenggan.

3. Keberlanjutan Program PBAK Berbasis Keluarga di Prenggan

Pasca pendampingan, Program PBAK Berbasis Keluarga di Prenggan sudah menjadi tanggung jawab sepenuhnya *stakeholders* yang ada di tingkat lokal. Untuk melihat keberlanjutan program, ada lima indikator sebagai tolak ukur keberhasilan, yaitu: pemahaman *stakeholders* terhadap program, sumber daya manusia (SDM),

finansial, *output* kebijakan dan/atau dampak kegiatan, serta regenerasi relawan.

Pertama, tingkat pemahaman *stakeholders* terhadap Program PBAK Berbasis Keluarga di Prenggan adalah modal awal keberlanjutan program (KPK, 2016: 45). Pemahaman *stakeholders* yang dangkal tentang urgensi program akan memengaruhi kecenderungan hanya sebagai pengikut, sedangkan sikap inisiatif, militansi, apalagi sikap pengorbanan akan lahir apabila pemahaman seseorang sudah membumi. Keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan atau program ditentukan oleh pemahaman implementor tentang apa yang harus dilakukan. Tujuan program harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran. Apabila tujuan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi oleh kelompok sasaran (George C. Edwards III dalam Subarsono, 2013: 90).

Pemahaman mendalam berada di pihak Relawan KPK di Prenggan, sehingga relawan sadar untuk terlibat aktif. Relawan tidak hanya berkorban waktu namun juga mengorbankan tenaga dan materi untuk menjalankan program. Proses pemahaman ditempa dari SR yang dilakukan KPK, dan proses komunikasi secara intens antara KPK dengan relawan. Tingkat keterlibatan seseorang atau komunitas bergantung pada tingkat pemahamannya.

Pemahaman *stakeholders* yang lain jauh berbeda dibanding relawan. Mayoritas masyarakat hanya tahu keberadaan program, dan sedikit yang mendalami tujuannya. Orangtua sasaran program memahami tujuan dan merasakan manfaat kegiatan sehingga mereka terlibat dalam kampanye dan pendidikan antikorupsi. Sedangkan pemerintah dan mayoritas organisasi lokal tidak terlibat aktif, hal ini disebabkan karena perbedaan segmen, visi-misi, dan prioritas kerja.

Pemerintah memahami deklarasi Prenggan sebagai *pilot project* kampung kejujuran pertama di Indonesia sebagai tugas dan tanggung jawab masyarakat sepenuhnya, sehingga dukungan kebijakan tidak ada sama-sekali. Pemerintah kelurahan tidak menyadari bahwa ini merupakan program pemerintah pusat yang sudah diamanahkan

kepada pemerintah daerah.

Demikian halnya dengan pihak swasta. Apabila kelompok swasta di luar Prenggan memahami program sebagai upaya yang sangat baik untuk mewujudkan generasi yang berintegritas, maka program tidak akan menemui kendala yang berarti. Lembaga kampus, NGO, dan pengusaha adalah kelompok yang sangat antusias mendukung program, namun belum berkontribusi secara nyata. Karenanya, ini menjadi peluang yang besar untuk memanfaatkan dukungan swasta demi kemajuan program di Prenggan.

Kedua, keberlanjutan Program PBAK Berbasis Keluarga di Prenggan diukur dari SDM yang dilibatkan, ketersediaan, kompetensi, dan kemandirian. KPK telah berusaha melibatkan semua pihak dalam pelaksanaan program, akan tetapi pada kenyataannya memang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Relawan KPK di Prenggan, Organisasi Aisyiyah, dan dibantu oleh beberapa relawan mahasiswa adalah aktor-aktor yang terlibat secara aktif. Kondisi ini terjadi karena beberapa faktor, umumnya akibat kesibukan masing-masing pihak. Namun, secara prinsip hanya karena tingkat militansi yang rendah. Weinbach (1994: 111) menyatakan bahwa para relawan biasanya tidak profesional dan mungkin juga secara nilai-nilai dan etik tidak seperti tenaga profesional. Oleh karena itu, pengelolaan tenaga relawan diperlukan perhatian cukup dalam menyeleksi, melatih, dan memelihara keberadaan para relawan tersebut.

Rasa memiliki terhadap komunitas atau program akan terbentuk melalui proses keterlibatan yang panjang dengan pemahaman yang mendalam. Selain itu, militansi akan terbentuk apabila ada pendekatan secara emosional antara satu pihak dengan pihak yang lainnya. Di antara para relawan sendiri belum semua memiliki kesadaran yang di atas rata-rata. Kesadaran untuk berkorban materi dan nonmateri hanya dimiliki oleh segelintir relawan, yang secara kuantitas sangat jauh dari proporsional. Relawan tidak lebih dari 30 orang, akan tetapi yang aktif hanya sekitar 20 orang. Sedangkan yang menjadi promotor (disebut tim inti) hanya sekitar lima orang. Kurang rasional apabila relawan harus mengkoordinasikan imple-

mentasi program kepada 880 keluarga sasaran.

Di samping kuantitas Relawan KPK di Prenggan yang sedikit, faktor kualitas (kompetensi) masih rendah. Upaya untuk meningkatkan kualitas SDM sudah dilakukan melalui Sekolah Relawan (SR) yang langsung diadakan oleh KPK di Prenggan. Pembekalan ini sepertinya belum cukup untuk membekali relawan dalam manajemen program. Meski demikian, SR telah membekali relawan untuk memahami maksud dan tujuan program secara menyeluruh. Selain itu, SR juga membekali relawan untuk membuat media kampanye antikorupsi dan *skill* di dalam pendidikan dan sosialisasi.

Minimnya kompetensi relawan menyebabkan beberapa kendala dalam pelaksanaan pendidikan, kampanye, sosialisasi, dan koordinasi. Di antaranya, yaitu: (1) pendidikan antikorupsi kepada keluarga sasaran tidak berjalan sistematis dengan materi yang jelas; (2) kampanye antikorupsi yang dilakukan tidak terkonsep dengan rapi, dan tidak memiliki media kampanye selain yang sudah disiapkan oleh KPK; (3) sosialisasi dan koordinasi dengan *stakeholders* terkait masih belum berjalan semestinya. Relawan seharusnya membangun kerja sama secara aktif dengan *stakeholders* yang ada. Baik kerja sama dengan pemerintah, jaringan organisasi di Prenggan, lembaga pendidikan formal dan informal, NGO yang aktif dalam gerakan antikorupsi, serta pihak swasta.

Selanjutnya, kemandirian Relawan KPK di Prenggan sangat dibutuhkan untuk keberlanjutan program yang telah diamanahkan kepada relawan. Dalam pelaksanaan setiap kegiatan, setidaknya dibutuhkan kemandirian dalam hal manajemen kegiatan dan pendanaan. Pertama, secara finansial relawan mengeluarkan iuran suka rela untuk operasional kegiatan. Kedua, kemandirian dalam manajemen kegiatan. Kondisi tersebut dapat dilihat saat relawan mengadakan kegiatan kampanye antikorupsi dengan melibatkan sekitar 500 anak di Prenggan. Namun, kemampuan relawan dalam manajemen kegiatan masih perlu ditingkatkan sehingga lebih terencana, terstruktur, dan terkonsep dengan baik. Persoalan di lapangan, yaitu: (1) kegiatan tidak terencana dengan baik sehingga sempat vakum

dalam beberapa bulan, tidak ada kegiatan yang dilaksanakan sama sekali; (2) konsep kegiatan masih jauh dari ideal karena banyak pekerjaan dilakukan secara monopoli, tidak ada pembagian tugas secara merata kepada semua anggota; (3) tingkat kepercayaan diri relawan perlu ditingkatkan.

Ketiga, keberlanjutan program juga ditentukan dari kemandirian finansial sehingga dapat melaksanakan program dengan maksimal. Menurut George C. Edwards dalam Subarsono (2013: 91), apabila pelaksana kekurangan sumber daya untuk melaksanakan program, maka program tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut mencakup sumber daya manusia dan finansial sebagai faktor penting untuk melaksanakan program secara berkelanjutan. Mazmanian dan Sabatier (Subarsono, 2013: 97) menyatakan bahwa sumber daya keuangan adalah faktor krusial untuk setiap program sosial. Setiap program juga memerlukan dukungan staf untuk melakukan pekerjaan administrasi dan teknis, serta memonitor program yang semuanya perlu biaya.

Finansial menjadi persoalan setelah tidak ada 'suntikan' dana dari KPK. Oleh karena itu, usaha yang dapat diupayakan relawan adalah mendapat legitimasi pendanaan dari pemerintah kelurahan. Relawan sudah mengupayakan di Musrembang, meskipun sampai 2018 belum berhasil. Oleh karena itu relawan perlu membangun *trust* dengan pihak pemerintah kelurahan. Pemerintah Daerah melalui kepala daerah merupakan pihak yang tepat mengelola program yang ditujukan kepada keluarga-keluarga di wilayahnya. Bahkan organisasi kemasyarakatan maupun keagamaan seperti PKK, Dharma Wanita, Muhammadiyah melalui Aisyiyah, NU melalui Fatayat, dan kelompok masyarakat lain yang langsung bersentuhan dengan keluarga juga bisa mengelola program ini. Target dari program ini adalah pada tahun 2045 terdapat generasi-generasi jujur dan antikorupsi (KPK, 2016: 17).

Besar kemungkinan program akan terus berlanjut karena tiga (3) sebab, yaitu: (1) relawan memiliki inisiatif untuk mencari bantuan dari warga lokal dan pengusaha di sekitar Prenggan; (2) meski-

pun tidak ada sumbangan finansial dari pribadi maupun institusi, pihak kelurahan masih memberikan dukungan formal; dan (3) masih banyak pihak yang peduli untuk membantu relawan dalam melakukan kampanye antikorupsi, di antaranya KPK, NGO, dan lembaga kampus. Persoalannya terletak dalam diri relawan untuk melakukan koordinasi dengan beberapa *stakeholders*. Di sinilah *skill* membangun jaringan dibutuhkan agar relawan tetap eksis dalam menjalankan program.

Keempat, keberhasilan suatu program dapat dilihat dari *output* kegiatannya (Dunn dalam Wibawa 1994: 5). KPK menargetkan empat hasil (*output*) dari kegiatan yang dilakukan, yaitu tersedianya *tools* antikorupsi, terbentuknya relawan, tersedianya fasilitas umum dengan konsep antikorupsi, dan terbentuknya jaringan koordinasi dengan *stakeholders* terkait (KPK, 2016: 30-40). Dari target tersebut yang belum berhasil adalah fasilitas umum yang dibuat oleh masyarakat maupun pemerintah. Sedangkan yang lainnya sudah mulai ada, meski belum berjalan maksimal. *Tools* antikorupsi memang disediakan oleh KPK, catatan paling penting adalah belum terciptanya *tools* yang secara mandiri digagas oleh relawan. Relawan dari masyarakat lokal sudah terbentuk meskipun belum banyak mengalami peningkatan secara kualitas dan kuantitas. Sedangkan koordinasi dengan pemerintah di kelurahan sudah dilakukan, akan tetapi belum menjadi *partner* yang bisa saling bekerja sama dalam pendidikan, sosialisasi, dan kampanye antikorupsi.

Meskipun ditemui banyak kendala (lihat tabel 1), kegiatan-kegiatan yang dilakukan telah banyak mengubah pemikiran masyarakat. Berdasarkan data lapangan, perubahan sikap dimulai dari perubahan metode pendidikan dalam keluarga dan tindakan tidak menerima hadiah yang tidak wajar. Sebagian masyarakat sudah menyadari bahwa anak perlu dididik, di antaranya dengan metode bercerita dan bermain dengan menyisipkan nilai-nilai antikorupsi dan keteladanan orangtua kepada anak dalam keluarga. Sebelum program dilaksanakan, mayoritas masyarakat tidak paham kaitannya pendidikan dalam keluarga dengan kasus korupsi. Sedangkan dalam

konteks sikap di lingkungan sosial, sebagian masyarakat semakin hati-hati dengan cara membaca kembali muasal setiap sesuatu yang bukan haknya. Masyarakat semakin kritis secara pemikiran mengenai segala yang berbau korupsi dan mulai paham konsep transparansi dalam organisasi.

Tabel 1 Permasalahan Faktual Program PBAK Berbasis Keluarga di Prenggan

Nama Kegiatan	Permasalahan
Pendidikan antikorupsi	1. Pendidikan antikorupsi bagi relawan dinilai masih kurang karena masih banyak relawan yang belum memiliki komitmen kuat untuk menjadi relawan. 2. Pendidikan antikorupsi bagi orangtua keluarga sasaran masih belum optimal karena masih banyak orangtua yang tidak paham Program PBAK Berbasis keluarga.
Sosialisasi dan kampanye antikorupsi	1. Tidak adanya dana dan yang paling penting kreativitas membuat relawan kesulitan untuk mengembangkan ide-ide dalam sosialisasi dan kampanye, hanya mengandalkan media kampanye yang sudah diberikan oleh KPK. 2. Sosialisasi kepada orangtua belum optimal karena orangtua sekadar datang ketika ada undangan tetapi hanya ditinggal *ngobrol* sendiri.

Koordinasi dengan *stakeholders* terkait	**1.** Kurangnya komunikasi dengan Pemerintah Kelurahan Prenggan membuat Program PBAK Berbasis Keluarga tersendat-sendat karena kurangnya dukungan pemerintah lokal. **2.** Adanya kelompok-kelompok tertentu yang merasa tidak dilibatkan dalam Program PBAK Berbasis Keluarga sehingga mereka tidak mau berpartisipasi aktif dalam mengembangkan program tersebut. **3.** Relawan kurang memahami pentingnya menjalin komunikasi dengan pihak swasta di luar Kelurahan Prenggan yang bisa dijadikan sebagai mitra lokal.

Sumber: Data yang diolah peneliti, 2018

Kelima, regenerasi Relawan KPK di Prenggan adalah poin pa-ling penting dalam keberlanjutan program. Regenerasi tidak hanya dimaksudkan sebagai penerus program, akan tetapi juga untuk memenuhi kuantitas dan kualitas relawan dalam melakukan aksi antikorupsi. Membentuk relawan dapat dilakukan dengan banyak cara, di antaranya dengan metode formal maupun nonformal. Secara formal, sebagaimana dilakukan KPK di Prenggan yang dikonsep dalam bentuk pelatihan untuk menyiapkan masyarakat menjadi relawan antikorupsi. Secara nonformal bisa dilakukan dengan pendekatan emosional. Sayangnya, Relawan KPK di Prenggan belum memikirkan regenerasi relawan. Urgensi meluaskan jaringan relawan didasarkan pada dua hal, yaitu jumlah relawan yang masih sedikit sedangkan target sasaran luas, dan kompetensi relawan dibutuhkan dari berbagai bidang keterampilan sehingga pendidikan dan kampanye antikorupsi bisa berjalan efektif.

Regenerasi relawan mudah terbentuk karena pengaruh ketokohan sosial. Tokoh masyarakat lokal di Prenggan cukup banyak, maka akan menjadi peluang yang besar untuk mengkonsolidasikan dukungan. Cara ini belum dilakukan secara maksimal oleh relawan, meskipun saat ini relawan telah menggandeng Aisyiyah sebagai *partner*. Faktor figur di dalam kondisi sosial yang homogen memiliki pengaruh yang besar (Zubaedi, 2013: 83). Dalam konteks ini,

apabila tokoh masyarakat memberikan dukungan yang besar maka akan mudah menggerakkan partisipasi sosial yang lain.

4. Pengembangan Model Implementasi Program PBAK Berbasis Keluarga di Prenggan

Berdasarkan analisis model dan pelaksanaannya di Prenggan, maka dibutuhkan alternatif pengembangan model Program PBAK Berbasis Keluarga sehingga menjadi lebih maksimal untuk mencapai target. Model yang ada saat ini sudah cukup baik, namun terdapat kendala dalam pelaksanaan di lapangan. Kendala utama adalah minimnya partisipasi *stakeholders.* Kendala lain, yaitu (1) tingkat pemahaman mayoritas *stakeholders* rendah, (2) ketersediaan, kompetensi, dan kemandirian SDM yang jauh dari ideal, (3) kemandirian finansial, (4) ketercapaian target *output* kegiatan rendah, dan (5) tidak ada regenerasi secara aktif.

Kendala tersebut terjadi karena banyak faktor yang saling berkaitan satu sama lain, di antaranya adalah faktor SDM, komunikasi, dan tingkat pemahaman. Namun, secara garis besar kendala implementasi program terjadi karena keterbatasan kemampuan objek intervensi program untuk menerjemahkan semua maksud pelaksana program. Menurut George C. Edwards III seperti dikutip oleh Subarsono (2013: 90), keberhasilan program atau kebijakan mensyaratkan agar implementor maupun target sasaran mengetahui apa yang harus dilakukan.

Kemampuan KPK dalam membangun komunikasi secara intens diperlukan dalam proses implementasi program. Pada aspek pemahaman, KPK menginginkan agar gagasan pembangunan budaya antikorupsi berbasis keluarga menjadi tanggung jawab semua pihak, tidak hanya para relawan namun juga tanggung jawab pemerintah lokal dan semua elemen yang ada di tingkat lokal. Pada kenyataanya, maksud KPK ini belum menjadi agenda bersama antara pemerintah dengan masyarakat. Kendala ini menjadi pekerjaan rumah bersama, khususnya KPK sebagai inisiator program.

Selesai pemetaan masalah, solusi mengacu pada empat kebu-

tuhan program, yaitu jaringan kerja, relawan yang mandiri, media pendidikan dan kampanye antikorupsi, serta dukungan kebijakan. Jaringan kerja dimaknai secara luas, yaitu keberadaan pihak-pihak yang dapat membantu dan melengkapi pelaksanaan program. Jaringan yang luas menandakan kualitas komunikasi dan publikasi yang dilakukan sehingga tercipta kepercayaan (*trust*). Jaringan yang luas terjadi apabila terdapat relawan yang secara mandiri berhubungan sosial (Alfitri, 2011: 52). Kemandirian dalam melakukan sosialisasi, koordinasi, dan lobi. Selanjutnya, program yang berjalan saat ini juga membutuhkan media pendidikan dan kampanye antikorupsi yang secara mandiri digali oleh relawan. Kreativitas relawan menciptakan media kampanye sangat diperlukan agar tidak bergantung kepada KPK. Kebutuhan program tersebut akan semakin maksimal apabila ada dukungan dari pemerintah lokal (*power of government*). Dukungan secara formal yang sangat diharapkan adalah kebijakan anggaran dan pengadaan infrastruktur untuk mendukung proses terlaksananya pendidikan dan kampanye antikorupsi di Prenggan.

Langkah yang penting dilakukan adalah pendampingan secara berkelanjutan, sehingga relawan memiliki kapasitas sendiri untuk menjalankan program. Pendampingan secara bertahap dikurangi ketika masyarakat mulai mandiri (Zubaedi, 2013:156). Proses pendampingan diiringi dengan evaluasi dan monitoring tidak hanya dalam peran dan fungsi jangka pendek (Ife, Jim, 2008: 178). Faktanya, KPK tidak melakukan pendampingan dan monitoring secara sistematis. KPK memulai intervensi program pada pertengahan 2014 dan selesai tahun 2016. Setelah itu tidak ada lagi monitoring secara berkala, apalagi pendampingan kepada relawan secara langsung. Meskipun komunikasi terjaga via *online*, namun kurang memberikan dampak yang berarti. Sejak tahun 2017 banyak sekali kegiatan yang tidak terlaksana. Mulai dari pendidikan, sosialisasi, dan kampanye antikorupsi serta koordinasi yang juga tidak berjalan baik. Kondisi ini menunjukkan kemandirian relawan masih belum terbentuk. Karena alasan ini dibutuhkan pendampingan berkelanjutan.

Selain itu, program belum menjadi milik bersama antara peme-

rintah, masyarakat, dan swasta. Semestinya aktor ini dapat memainkan peran sesuai dengan kapasitas masing-masing; pemerintah dengan kebijakan anggaran, tokoh masyarakat sebagai penggerak lingkungan sosial, pemuda sebagai pelengkap sumber daya relawan, dan swasta sebagai penyokong finansial dan nonfinansial. Semua persoalan ini dapat diatasi apabila relawan memiliki kemauan dan kemampuan mengatasi masalah ini.

Relawan yang sudah dibentuk adalah kunci utama dalam penyelesaian masalah di lapangan, maka dari itu penting agar KPK mendampingi relawan sehingga mandiri. Cara yang dapat dilakukan, yaitu: (1) monitoring dan evaluasi program secara berkala. Secara rutin KPK melakukan koordinasi dengan relawan untuk memantau kegiatan relawan; (2) persoalan yang tidak dapat dipecahkan sendiri oleh relawan maka perlu didampingi KPK dalam penyelesaian sehingga masalah menjadi tuntas; (3) KPK melakukan mediasi dan negosiasi dengan NGO dan lembaga kampus sehingga pendampingan dapat dilakukan secara bersama-sama; dan (4) kelompok relawan perlu inisiatif sendiri meningkatkan *skill* dibantu oleh KPK. *Output*-nya adalah lahirnya kemandirian relawan dalam segala hal sesuai dengan potensi kemampuan yang dimiliki masyarakat. Meskipun ini adalah harapan yang besar, potensi yang ada dalam diri relawan memungkinkan mencapai tingkatan kemandirian jika benar-benar diasah secara bertahap dan berkelanjutan.

C. PENUTUP

1. Simpulan

Dari uraian evaluasi program, maka implementasi Program PBAK Berbasis Keluarga di Prenggan tidak tercapai maksimal karena beberapa hal, yaitu: (1) rendahnya partisipasi pemerintah, sebagian besar organisasi masyarakat, dan swasta, (2) tingkat pemahaman mayoritas *stakeholders* rendah, (3) kompetensi dan ke-

mandirian relawan belum terbentuk, (4) belum ada dukungan kebijakan anggaran sehingga tidak ada jaminan finansial, (5) *Output* kegiatan belum menghasilkan jaringan relawan dari semua elemen, kebijakan pemerintah yang mendukung program, dan tidak ada *tools* (media) kampanye yang dikembangkan sendiri oleh masyarakat, serta (6) regenerasi relawan tidak dilakukan secara aktif.

Peneliti menawarkan alternatif pengembangan model implementasi program yang partisipatif dan berkelanjutan. Kesimpulan ini didasarkan pada persoalan utama model yang sudah ada, yaitu rendahnya partisipasi *stakeholders,* dan program bersifat parsial karena tidak ada pendampingan secara berkelanjutan sehingga masyarakat menjadi berdaya. Pendampingan yang berkelanjutan ditujukan, yaitu: (1) untuk mengembangkan jaringan kerja; (2) untuk memaksimalkan koordinasi dengan pemerintah lokal, lembaga pendidikan, dan NGO; (3) agar pendampingan tidak hanya dilakukan oleh KPK, akan tetapi juga oleh pemerintah lokal dan swasta; dan (4) untuk memaksimalkan tugas monitoring dan evaluasi terhadap program yang sudah berjalan. Sedangkan model implementasi program yang partisipatif harus mengedepankan tiga hal, yakni kolaborasi, kesadaran bersama, dan partisipasi sesuai dengan kemampuan masing-masing *stakeholders*.

2. Rekomendasi

Berdasarkan analisis terhadap masalah faktual di lapangan, dalam penelitian ini penulis merekomendasikan beberapa hal.

a. KPK menyusun strategi pendampingan yang berkelanjutan, di antaranya kerja sama dengan lembaga pendidikan tinggi dan NGO di Kota Yogyakarta. Pendampingan fokus dalam upaya memberdayakan relawan yang telah dibentuk, kemandirian finansial, dan penguatan jaringan kerja.

b. KPK kembali menjembatani komunikasi antara relawan dengan pemerintah lokal sehingga mendapatkan legitimasi secara formal.

c. Relawan yang ada fokus meningkatkan *soft skill* dengan tetap berupaya untuk kaderisasi relawan dengan aktif.

d. Relawan berusaha mendirikan komunitasnya sebagai NGO antikorupsi yang independen.

D. REFERENSI

Ach. Wazie Ws.,*et al.,* ed. 1999. *Panduan Penguatan Manajemen Lembaga Swadaya Masyarakat*. Jakarta: Sekretariat Bina Desa dengan dukungan AusAID melalui Indonesia HIV/AIDS and STD Prevention and Care Project.

Ade Imelda Frimayanti. 2017. Pendidikan Antikorupsi dalam Pendidikan Agama Islam. *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*. Diakses dari ejournal.radenintan.ac.id. tanggal 30/4/2018

Alfitri, Dr., M.Si. 2011. Community Development; *Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Aprillia Theresia, Dr. NTP., M.Si., dkk. (2014). *Pengembangan Berbasis Masyarakat*. Bandung: Alfabeta.

Bintoro Tjokroamidjojo. 1993. *Perencanaan Pembangunan.* Jakarta: Mas Agung.

Cucu Sutrisno. 2017. Strategi Penanaman Nilai-nilai Antikorupsi di Prenggan Kotagede Yogyakarta. *Tesis.* Prodi PPKn, Universitas Negeri Yogyakarta.

Finn Heinrich. "Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Turun ke Peringkat 90". Diakses dari *https://www.voaindonesia.com/a/indeks-persepsi-korupsi-ri-turun-/3692750.html* pada 18/10/2017

I. Yoman Sumaryadi. (2010). *Sosiologi Pemerintahan: Dari Perspektif Pelayanan, Pemberdayaan, Interaksi, dan Sistem Kepemimpinan Pemerintahan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

ICW (Indonesia Corupption Watch). "Dalam 6 Bulan, 226 Kasus Korupsi Rugikan Uang Negara Rp 1,3 T". *https://news.detik.com/berita/d-3621894/icw-dalam-6-bulan-226-kasus-korupsi-rugikan-negara-rp-183-t* diakses 19/10/2017

Iswan Helmi. "Butuh Satu Dua Generasi Ubah Kultur Korupsi". Diakses dari *https://nasional.kompas.com/read/2013/10/03/2045411/Butuh.Satu.Dua.Generasi.Ubah.Kultur.Korupsi* pada 29/4/2018.

Isbandi Rutminto Adi. 2008. *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat.* Jakarta: Rajawali Pers.

Jim Ife, Frank Tesoriero. 2008. *Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi;* Community Development. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Jung, Yong-duck; Mazmanian, Dniel; Tang, Shui-Yan. 2009. Collaborative Governance in the United States and Korea: Cases in Negotiated Policy Making and Service Delivery. *Article.* School of Policy, Planing and Development, University of South California, Bedrosian Center on Governance and Public Enterprise, Los Angeles.

Komisi Pemberantasan Korupsi. "Rekapitulasi Tindak Pidana Korupsi". Diakses dari *https://acch.kpk.go.id/id/statistik/tindak-pidana-korupsi* diakses 19/10/2017

_____. 2014. *Membangun GenAksi dari Keluarga Jujur Keluarga Bahagia.* Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK RI.

_____. 2014. *Modul Pencegahan Korupsi Berbasis Keluarga***.** Jakarta: Kedeputian Bidang Pencegahan KPK RI, Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat.

_____. 2016. *Panduan Pelaksanaan Program Pencegahan Korupsi Berbasis Keluarga (Untuk Pemerintah Daerah dan Pemangku Kepentingan Lainnya)*. Jakarta: KPK.

M. Rabi'e. 2015. Partisipasi Masyarakat dalam Program Pembangunan Budaya Antikorupsi Berbasis Keluarga di Kelurahan Prenggan, Kecamatan Kotagede, Yogyakarta. *Skripsi.* Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta.

Moleong, L. J. *2010*. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Ban-dung: Remaja Rosda karya.

Robert W. Weinbach. *The Social Worker as Manager, Theory and Practice*. Boston: Allyn & Bacon.

Samodra Wibawa. 1994. Evaluasi Kebijakan Publik. Yogyakarta: Raja Grafindo Persada.

Subarsono. 2013. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori, dan Aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2009. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Soetomo. 2006. *Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Zubaedi, Dr. M.Ag., M.Pd. 2013. *Pengembangan Masyarakat; Wacana dan Praktik.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group.